

RINGKASAN

Tulisan ini akan menjelaskan tentang bagaimana politik implementasi yang terjadi pada peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2020 sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi permasalahan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bogor pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam kebijakan ini. Aktor-aktor yang terlibat adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa dan masyarakat terdampak. Dinas Sosial dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam kebijakan ini belum bisa melakukan penjangkauan dan memberikan pengaruh kepada aktor-aktor lain di bawahnya untuk bisa melaksanakan tugas dengan maksimal yang menyebabkan adanya kesalahan pendataan penerima bantuan dan penyaluran kepada masyarakat. Hal tersebut berakibat pada bantuan yang disalurkan menjadi tidak tepat sasaran. Terjadi interaksi yang kurang maksimal ditandai dengan kurang maksimalnya aktor utama pelaksana kebijakan dalam memengaruhi dan menjangkau aktor lainnya dan juga terdapat perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah menggambarkan adanya sebuah proses politik dalam suatu implementasi kebijakan. Bupati sebagai penanggungjawab Perbup ini juga tidak mengambil langkah politik (*political will*) untuk menuntaskan masalah interaksi antar aktor.

Kata kunci: Politik Implementasi, Peraturan Bupati, Bantuan Sosial

SUMMARY

This article will explain how the politics of implementation occurred in the Bogor Regent Regulation Number 24 of 2020 concerning the Provision of Non-Cash Social Assistance to Communities Affected by Covid-19 in Bogor Regency. The Bogor Regency Government issued Bogor Regent Regulation Number 24 of 2020 as an effort to overcome the economic problems that occurred in Bogor Regency during the Covid-19 pandemic. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach. The research results reveal that there are several actors involved in this policy. The actors involved are the Department of Trade and Industry, the Office of Social Affairs, Districts, Villages and the affected communities. The Office of Social Affairs and the Office of Trade and Industry in this policy have not been able to carry out outreach and influence other actors under them to be able to carry out their duties to the fullest which has led to errors in the data collection of aid recipients and distribution to the community. This resulted in the aid being distributed to be not on target. There is less than optimal interaction characterized by the lack of maximum actors implementing the policy in influencing and reaching other actors and there are also differences in interests between the community and the government which illustrates the existence of a political process in a policy implementation. The Regent as the person in charge of this Perbup also does not take political steps (political will) to resolve the problem of interaction between actors.

Keywords: *Implementation Politics, Regent's Regulations, Social Assistance*